

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disaat perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat ini, setiap pelaku usaha terus didorong untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam persaingan bisnis yang semakin sulit dan ketat. Para pihak perusahaan selalu dituntut untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin baik dari sisi operasional maupun dari sisi keuangan perusahaan itu sendiri. Segala keberhasilan dari pihak manajemen dalam mengelola perusahaan akan membawa dampak yang positif dengan adanya peningkatan nilai perusahaan. Seorang manajemen akan selalu memimpikan perusahaan mengalami laba yang tinggi dan yang mendapat nilai kepercayaan yang lebih dari pemegang saham, masyarakat serta pemerintah. Dan tuntutan bagi setiap perusahaan agar memiliki *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas operasional suatu perusahaan. Dan apabila suatu perusahaan dapat mencapai *corporate governance* dengan baik maka akan berdampak positif bagi nilai perusahaan tersebut (Yuliusman, 2020)

Perbankan merupakan salah satu sektor yang bergerak dan bertugas menggerakkan perekonomian negara, sehingga di Indonesia sektor perbankan sendiri diatur oleh undang-undang No.10 Tahun 1998. Dan berdasarkan undang-undang fungsi utama perbankan sebagai penyalur dana bagi masyarakat. Suatu negara bisa dibilang stabil ekonominya karena dipengaruhi oleh kesehatan perbankan, tanpa adanya lembaga perbankan yang mampu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat maka sektor-sektor perekonomian akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu perbankan pun telah mengalami perkembangan mulai dari digital, persaingan suku bunga, hingga persaingan untuk mendapatkan dana. Oleh sebab itu perlu adanya informasi

yang menjelaskan tentang gambaran nilai perbankan. Rendahnya praktik GCG juga berdampak pada instansi perbankan di Indonesia.

Dan ini adalah pernyataan yang dikemukakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dan berdasarkan hasil riset dari LPPI; nilai rata-rata praktik GCG dalam beberapa tahun belakangan mengalami perbaikan. Pada tahun 2016, nilainya berada pada level 2,16 dan setahun setelahnya berda pada level 2,07 dan data pada tahun terakhir 2018 berada di level 2.02. Dan dalam perjalanan penerapan GCG dinilai berfluktuasi, pada pertama kali diterapkannya GCG pada industri perbankan sangat baik tetapi setahun setelah berjalannya praktik GCG perbankan mengalami penurunan. Pada tahun 2008-2010 penerapan GCG dari perbankan memperlihatkan perbaikan peringkatnya kembali memburuk dan mencapai puncaknya pada tahun 2015, memang sepanjang tahun 2011-2015 industri perbankan menghadapi banyak masalah yang tidak ringan terkait praktik kecurangan (farud) yang terjadi pada beberapa bank umum. Adapun beberapa kasus tindak kejahatan yang terjadi beberapa tahun terakhir dan berdampak pada kerugian perusahaan. Beberapa diantaranya yaitu,

1. PT. Citibank di tahun 2011 oleh Senior Relationship Manager kepada nasabah citibank dengan kasus penggelapan dana dengan angka kerugian RP 17 Miliar Sehingga tersangka dijatuhi hukuman 8 tahun penjara (www.tirto.com)
2. PT. Elnusa di Bank Mega pada 2011 yang melibatkan kepala KCP Bank Mega Jababeka, dengan kasus pembobolan Dana sehingga merugikan perusahaan Elnusa Tbk sebagai nasabah dengan angka kerugian dengan total kerugian sebesar RP. 111 miliar. Dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara serta denda 300 juta. (www.tirto.com)
3. Bank Mandiri pada tahun 2014 kasus pembobolan dan dan juga skimming kartu debit dan kredit.

4. Bank BTPN pada tahun 2015 dana sebesar Rp22 miliar milik Pemerintah Kota Semarang raib dari deposito yang dikelola bank BTPN. Pemkot menyimpan uang sebesar ROP 22 Miliar yang didepositokan ke BTPN sejak 2007, dalam bentuk rekening koran.
5. PT. BTN pada tahun 2017 yang dilakukan oleh kepala kantor kas BTN Cikeas, Bambang Soeparno kepada nasabah yaitu PT.Surya Nusantara Finance dengan total angka kerugian RP.110 MILIAR. Sehingga dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 1 Miliar (www.tirto.com)

Good corporate governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan entitas dalam menunjang segala fungsi entitas serta dapat mengontrol operasional perusahaan apakah telah dijalankan sesuai dengan fungsi GCG yang baik dan dapat meminimalisir kasus penyelewengan yang sering terjadi. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam GCG adalah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban indenpendasi, dan kewajiban *corporate governance*, yang dapat diartikan sebagai suatu pengendalian internal perusahaan yang diyakni dapat mengontrol hal-hal buruk yang sering terjadi dan mendorong terbentuknya manajemen perusahaan yang bersih dan transparan. Penerapan GCG juga salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang secara tidak langsung dapat mendorong citra masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Corporate governance adalah bagian yang telah diatur dalam setiap mekanisme dan yang memegang kendali atas suatu perusahaan dalam proses mencapai tujuannya, yaitu selalu memaksimalkan laba jangka panjang untuk para 10 pemegang saham, (raras mahiswari & Nugroho, n.d.) Mekanisme Corporate governance sebagai kontrol yang diatur sedemikian rupa dengan tujuan memantau bagian internal perusahaan sehingga perusahaan terhindar dari

kecurangan dan juga untuk memastikan setiap operasional perusahaan berjalan sebaik mungkin sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Corporate governance telah menjadi suatu pedoman bagi para manajer untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan sebaik mungkin. Sebagai manajer akan mengambil tindakan maupun keputusan yang pastinya akan menguntungkan bagi setiap pihak (stakeholder). Untuk menurunkan biaya modal dan menurunkan tingkat risiko yang akan terjadi, pihak manajer dituntut untuk lebih bekerja secara efektif dan efisien. Tindakan yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Dengan demikian sebagai investor akan mendapat pendapatan (return) sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima pilar dasar, yaitu:

1. **Transparansi (transparency)**, perusahaan diharuskan dapat memberikan berbagai informasi yang akurat dan mudah dijangkau oleh pemangku kepentingan. Transparansi ini juga memudahkan perusahaan untuk lebih objektif dan melakukan bisnis secara sehat.
2. **Akuntabilitas (accountability)**, perusahaan diharuskan dapat bertanggungjawab penuh pada kinerjanya dan harus secara transparan dengan tujuan agar dalam proses mengelola perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.
3. **Pertanggungjawaban (responsibility)**, pada prinsip ini perusahaan harus menjalankan tanggung jawabnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dan menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi keberlangsungan usaha ke depannya.
4. **Kemandirian (independency)**, perusahaan diharuskan untuk dikelola secara independen, sehingga tidak ada sifat mendominasi di antara pihak perusahaan

(Pemegang saham, komisaris independen / dewan pengawas, dan direksi). Keadilan (fairness), pada sprinsip

Terdapat 2 kelompok besar dari mekanisme *corporate governance* yaitu mekanisme tata kelola internal dan mekanisme tata kelola eksternal. Yang mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal merupakan *corporate governance* internal sedangkan untuk pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar merupakan mekanisme dari tata kelola eksternal (raras mahiswari & Nugroho, n.d.) dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai mekanisme *corporate governance*.

Kepemilikan manajerial adalah presentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manejer, dan dewan komisaris, dan yang dapat dilihat pada laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan saham ini pihak manajerial akan bertindak dengan sangat hati hati karena akan turut menanggung resiko atas setiap keputusan yang diambil. Kepemilikan manajerial lebih termotivasi meningkatkan kinerja untuk mengelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial diproksikan dengan MOWN, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki manajemen terhadap jumlah saham yang beredar (Sholekah & Venusita, 2014)

Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang berada di di dalam sebuah perusahaan dapat menimbulkan asumsi menarik yakni nilai perusahaan dapat meingkat sebagai akibat dari kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang meningkat. Oleh karnannya, kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang besar ini akan efektif dalam memonitoring aktivitas di dalam perusahaan. (Dewi & Sanica, 2017) Kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau manajer yang sekaligus berperan sebagai pemilik perusahaan ini akan selalu berupaya melindungi seluruh hak investor. Dalam hal tersebut manajer senatiasi

akan menanggung segala risikonya seperti contoh kerugian apabila perusahaan tersebut melakukan fraud, hal ini dapat membuat manajer lebih termotivasi dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Mudrikah et al., 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, temuan itu bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Soraya et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfaza et al., 2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Menurut FCGI Dewan komisaris adalah bagian inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin strategi pelaksanaan yang diterapkan oleh perusahaan, mengawasi kerja pihak manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dan pada intinya, dewan komisaris adalah mekanisme yang mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan bagi pengelola perusahaan. Dewan Komisaris Independen juga memegang peran yang penting bagi perusahaan, terutama dalam implementasi mekanisme. Fungsi Dewan Komisaris Independen yaitu menjadi penyeimbang dalam mengambil keputusan yang di dalamnya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan.

Dewan komisaris independen berperan sebagai pengawas di dalam perusahaan atas kinerja perusahaan tersebut. Dewan komisaris independen yang dalam hal ini merupakan penyelenggara dari pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris yang efektif dapat meningkatkan standar kinerja dari manajemen di dalam perusahaan sehingga dapat

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris ialah orang yang fundamental dalam menjalankan dan mengawasi sistem tata kelola yang diterapkan dalam perusahaan. Inti dari penerapan mekanisme *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin dalam pelaksanaan strategi perusahaan yang mewajibkan terlaksananya akuntabilitas ialah dewan komisaris. Dalam hal ini, dewan komisaris juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari kesuksesan dan ketahanan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris juga dibantu oleh komite audit, karena mengingat tugas dari dewan komisaris sebagai pengawas dari jalannya perusahaan cukup berat.

Hasil penelitian yang dilakukan (Mudrikah et al., 2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soraya et al., 2020) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Elisabeth Penti Kurniawati, 2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfaza et al., 2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Komite audit adalah bagian dalam perusahaan yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal menjaga kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, dengan memastikan terlaksanannya sistem pengawasan dan pengendalian manajemen yang memadai serta terlaksananya *Good Corporate Governance*. Komite Audit dibentuk agar mampu meningkatkan efektivitas perusahaan karena komite audit adalah bagian penting dalam pengendalian internal perusahaan (Rachmawati & Triatmoko, 2007)

Komite Audit juga merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan pihak perusahaan yaitu pihak eksternal maupun pihak dari dewan komisaris, dimana tugas

Komite Audit adalah melakukan usaha dalam mengelola dan mengawas perusahaan sebagai kontribusi kepada perusahaan agar dapat dipertanggung jawabkan. Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai dengan cara memberikan informasi perusahaan secara jelas dan transparan. Hal ini dilakukan agar mengurangi kesalahan informasi yang diberikan (Onasis & Robin, 2016)

Hasil penelitian komite audit yang dilakukan oleh (Mudrikah et al., 2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Soraya et al., 2020) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Elisabeth Penti Kurniawati, 2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

(Purwanto & Agustin, 2017) menjabarkan bahwa nilai perusahaan merupakan sebuah komponen penting yang mampu mengukur kinerja perusahaan secara tidak langsung dan mempengaruhi penilaian investor dan kreditor terhadap perusahaan tersebut. Menurut (Luthfiah & Suherman, 2018) salah satu aspek penting yang dilihat dalam menunjang nilai perusahaan terletak pada kinerja keuangan perusahaan yang mampu secara langsung mendorong para investor dan kreditor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut yang pada akhirnya menambah nilai pasar saham perusahaan tersebut, Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat pengembalian, dimana perusahaan dengan kondisi baik akan semakin diminati oleh investor dan kreditor dikarenakan dianggap memiliki tingkat pengembalian yang cukup baik. Peningkatan nilai perusahaan bisa dicapai apabila manajemen perusahaan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak lain di dalam membuat keputusan-keputusan keuangan. Pihak lain tersebut diantaranya meliputi shareholder dan stakeholder. Apabila tindakan yang dilakukan manajer dan pihak lain tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka permasalahan tidak akan terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Akan tetapi pada

kondisi yang sesungguhnya, penyatuan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut sering kali menemui masalah. Pihak manajemen perusahaan juga dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham, dihadapkan pada kepentingan untuk terus meningkatkan kesejahteraan diri mereka masing-masing. Akibatnya tidak jarang perbedaan kepentingan tersebut menjadikan pihak manajemen memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan umum perusahaan (Yadnyana & Wati, 2011). Terdapat cara menentukan nilai perusahaan yaitu dengan menggunakan *Price To Book Value* (PBV). PBV sendiri merupakan salah satu ukuran dalam menentukan harga saham suatu perusahaan yang dilihat berdasarkan saham beredar dalam perusahaan tersebut dibagi dengan nilai buku perusahaan yang tertera dalam necara perusahaan. (Salim & Susilowati, 2020) menjelaskan lebih lanjut jika entitas tau perusahaan yang memiliki rasio PBV diatas 1 maka dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan tersebut dalam kondisi baik dan sebaiknya jika dibawah 1 maka harga saham perusahaan dalam kondisi tidak bagus.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* dan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERBANKAN”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada pada sektor perbankan ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan

1.4 Manfaat/kontribusi riset

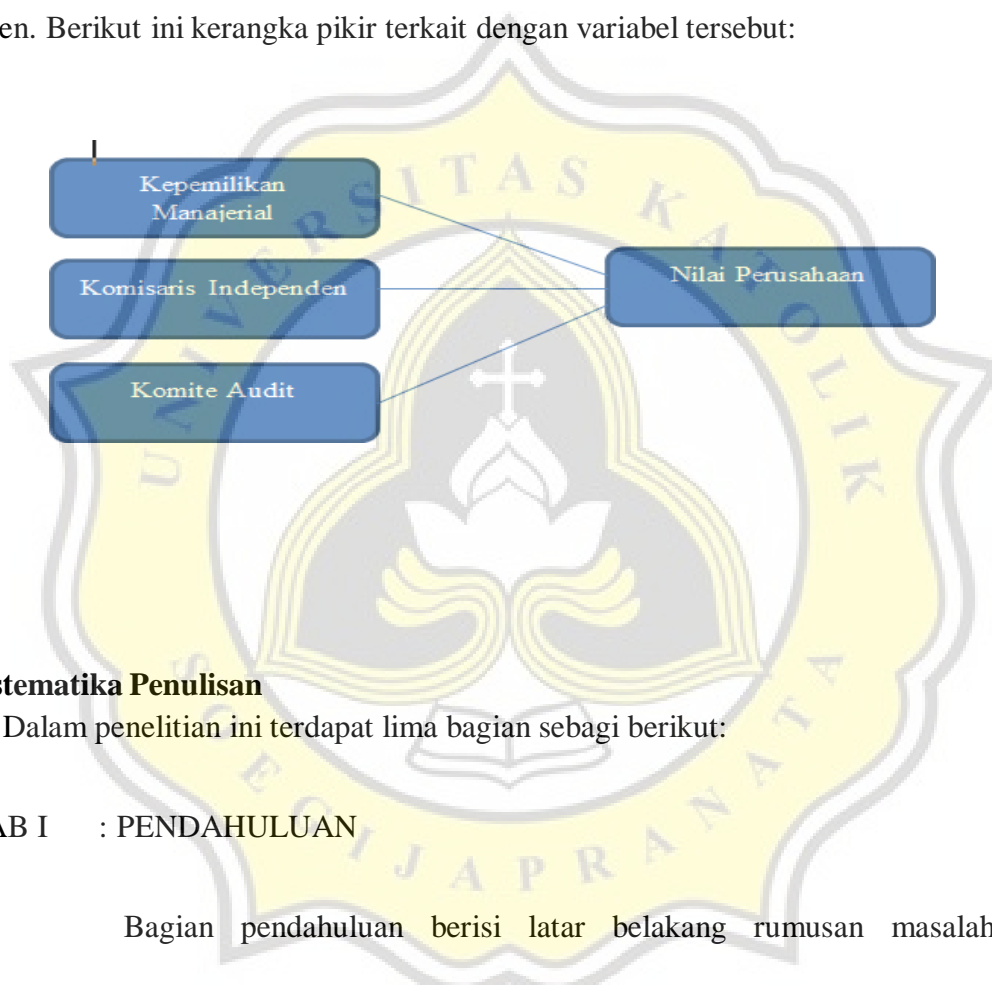
Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya:

1. Manfaat Akademik:
 - a Diharapkan penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan tentang pengaruh *corporate governance*, kepemilikan manjerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan.
 - b Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan dalam penelitian di masa yang akan datang tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan.
2. Manfaat Praktis:
 - a Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

- b Penelitian ini diharapkan membantu investor dalam mengambil keputusan yaitu keputusan untuk menamakan investasinya pada perusahaan yang nilai perusahaanya baik.

1.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen. Sedangkan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Berikut ini kerangka pikir terkait dengan variabel tersebut:



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, model penelitian, kerangka pikir, sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian ini, serta dalam mengembangkan hipotesis yang menjelaskan kaitan antara variabel dan dependen.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian diuraikan tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, definisi operasional, desain analisis data dan uji hipotesisi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan atas analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.